MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/Permentan/SR.310/11/2018
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional;

b. bahwa pupuk bersubsidi berkaitan dengan pengadaan, penyaluran, dan harga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK. 05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480)
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 399);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);

Memperhatikan : 1. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

2. Surat Direktur Jenderal Anggaran Selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dan Pengelolaan Belanja Lainnya Nomor S-964/AG/2018 tanggal 25 September 2018, hal Permintaan RKA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA.999.07) dan Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) Berdasarkan Pagu Anggaran BUN TA 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani di Sektor Pertanian.
2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan, termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
3. Penambahan Luas Areal Tanam Baru selanjutnya disebut PATB adalah penanaman padi, jagung, dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung, dan/atau kedelai.

4. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau budi daya ikan.
5. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan Kelompok Tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).
7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur lini IV.
10. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.

11. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
12. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dilaksanakan dan disahkan oleh 1 (satu) anggota tim atau lebih yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan.
13. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
14. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
15. Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
16. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
17. Kepala Dinas Daerah Provinsi adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan provinsi.
18. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan kabupaten/ kota.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengalokasian dan penetapan HET Pupuk Bersubsidi.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI DAN

PENGUSULAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUDSIDI

Pasal 3

(1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

(2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA, dan NPK.

Pasal 4

Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERUNTUKAN DAN PENETAPAN

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani.

(2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun RDKK sebagai berikut:

a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam;

b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau

c. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor perikanan budi daya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam.

(3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perusahaan perikanan budi daya.

Pasal 6

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya serta alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia.

(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, provinsi, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam hal Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perubahan jumlah alokasi provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 6, dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.

(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan serapan pupuk tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi per provinsi.

(3) Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai koordinator pengusulan Pupuk Bersubsidi wilayah provinsi untuk semua sub sektor.

(4) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan.

(5) Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat ditetapkan pada bulan Januari 2019.

Pasal 8

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan serapan pupuk tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi per kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi.
(3) Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagai koordinator pengusulan Pupuk Bersubsidi wilayah kabupaten/kota untuk semua sub sektor.
(4) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan.
(5) Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat diterbitkan pada bulan Januari 2019.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

(1) Dalam hal Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 terjadi kekurangan atau kelebihan, pemenuhan Pupuk Bersubsidi dipenuhi melalui realokasi antarwilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia.

(2) Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
   a. realokasi antarprovinsi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
   b. realokasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi; atau
   c. realokasi antarkecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Provinsi yang mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antarkabupaten/kota yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(4) Kabupaten/kota yang mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau realokasi antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antarkecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(5) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Penetapan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. serapan pupuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
b. rencana luas tanam;
c. dosis spesifik wilayah; dan/atau
d. ketersediaan alokasi Pupuk Bersubsidi.

BAB V
HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

(1) Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. Pupuk Urea = Rp1.800,00 per kg;
    b. Pupuk SP-36 = Rp2.000,00 per kg;
    c. Pupuk ZA = Rp1.400,00 per kg;
    d. Pupuk NPK = Rp2.300,00 per kg; dan
    e. Pupuk Organik = Rp500,00 per kg.
(3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di Pengecer Resmi secara tunai dalam volume sebagai berikut:
    a. Pupuk Urea = 50 kg;
    b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
    c. Pupuk ZA = 50 kg;
    d. Pupuk NPK = 50 kg; dan
    e. Pupuk Organik = 40 kg.

Pasal 12

(1) Kemasan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian warna tertentu sebagai pembeda antara Pupuk Bersubsidi dan nonsubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DAN
PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 13

(1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Kartu Tani.
(3) Penerapan penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan Kartu Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada wilayah kabupaten/kota tertentu sebagai ujicoba.
(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan Kartu Tani pada wilayah tertentu sebagai uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

(1) Terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana Pasal 13 dilakukan Verifikasi dan/atau Validasi.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Verifikasi dan/atau Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi, Kepala Dinas Daerah Provinsi, dan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia;
12. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/Permentan/SR.310/11/2018
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2019
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	ACEH	54,400	16,668	9,247	35,249	6,605
2	SUMATERA UTARA	96,893	32,155	29,107	78,129	15,625
3	SUMATERA BARAT	56,055	28,112	13,883	58,359	10,809
4	J A M B I	27,491	20,213	10,264	55,759	6,974
5	R I A U	35,260	16,651	12,621	50,080	8,741
6	BENGKULU	21,820	7,723	4,923	25,327	4,334
7	SUMATERA SELATAN	107,790	29,458	2,278	75,586	4,871
8	BANGKA BELITUNG	24,343	5,450	3,389	20,308	9,419
9	LAMPUNG	258,377	43,037	13,537	152,567	18,950
10	KEP. RIAU	40	10	10	143	70
11	DKI. JAKARTA	10	19	-	15	1
12	BANTEN	64,094	21,735	1,315	30,527	8,188
13	JAWA BARAT	531,043	154,833	70,708	291,251	70,405
14	D.I. YOGYAKARTA	36,989	3,647	9,267	24,351	3,899
15	JAWA TENGAH	679,347	130,038	181,337	347,267	198,121
16	JAWA TIMUR	1,074,758	155,499	508,938	590,710	507,404
17	B A L I	31,173	1,028	3,239	19,204	5,298
18	KALIMANTAN BARAT	17,508	6,368	1,900	44,227	5,838
19	KALIMANTAN TENGAH	17,154	4,639	1,356	31,757	2,862
20	KALIMANTAN SELATAN	21,273	4,070	709	26,082	3,374
21	KALIMANTAN TIMUR	17,934	5,237	2,395	36,699	2,837
22	KALIMANTAN UTARA	1,497	127	32	4,642	163
23	SULAWESI UTARA	22,526	4,118	342	12,391	1,243
24	GORONTALO	34,253	1,725	830	28,878	1,684
25	SULAWESI TENGAH	34,891	2,583	7,741	27,353	2,650
26	SULAWESI TENGGARA	21,467	7,609	4,581	18,608	5,731
27	SULAWESI SELATAN	305,534	48,803	72,740	136,666	23,493
28	SULAWESI BARAT	28,777	2,401	9,162	22,655	1,725
29	NUSA TENGGARA BARAT	161,289	18,688	18,525	49,622	11,010
30	NUSA TENGGARA TIMUR	27,702	3,107	627	16,971	2,415
31	MALUKU	3,362	323	229	2,645	815
32	PAPUA	7,522	2,654	576	8,375	2,247
33	MALUKU UTARA	1,301	141	128	1,865	74
34	PAPUA BARAT	1,127	131	64	1,732	125
JUMLAH		3,825,000	779,000	996,000	2,326,000	948,000

MENTERI PERTANIAN,
REPUBLIK INDONESIA

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/Permentan/SR.310/11/2018
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2019 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(Ton)

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	3,825,000	347,678	287,698	309,400	321,795	312,343	230,625	254,431	239,018	268,760	297,199	408,877	547,178
SP-36	779,000	69,074	86,765	92,234	80,169	69,050	38,252	58,354	44,430	56,750	62,792	60,872	60,259
ZA	996,000	92,685	88,385	98,865	89,995	78,624	51,367	81,097	69,714	78,497	88,329	90,649	87,792
NPK	2,326,000	158,641	199,556	222,484	209,512	194,008	126,724	176,857	147,703	171,328	184,355	269,301	265,530
ORGANIK	948,000	64,427	80,726	95,215	82,463	74,556	46,818	83,549	67,830	76,608	92,869	95,400	87,540
JUMLAH PUPUK	8,874,000	732,505	743,130	818,198	783,934	728,581	493,786	654,288	568,695	651,943	725,544	925,099	1,048,299

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II.1
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/Permentan/SR.310/11/2018
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	54,400	4,759	6,374	3,686	3,825	5,058	3,844	4,420	3,161	3,018	4,479	5,036	6,737
2	SUMATERA UTARA	96,893	5,050	8,887	9,462	8,967	8,177	4,563	7,297	7,334	9,095	9,794	7,811	10,454
3	SUMATERA BARAT	56,055	4,637	4,388	4,651	5,825	4,347	2,503	4,548	4,097	5,106	4,534	4,883	6,537
4	J A M B I	27,491	1,713	2,837	1,707	2,179	1,836	1,047	2,129	1,513	2,461	2,288	3,328	4,452
5	R I A U	35,260	2,053	2,875	2,523	2,779	2,707	1,084	3,109	2,754	3,353	2,361	4,132	5,531
6	BENGKULU	21,820	1,792	2,420	1,824	2,025	1,899	1,108	1,142	1,744	1,580	2,023	1,823	2,440
7	SUMATERA SELATAN	107,790	8,723	9,741	9,127	9,396	9,160	6,710	7,024	5,102	6,642	10,875	10,817	14,476
8	BANGKA BELITUNG	24,343	1,116	1,983	2,214	1,776	1,875	1,248	1,831	2,071	1,712	3,074	2,328	3,115
9	LAMPUNG	258,377	29,681	25,028	22,748	20,635	23,286	16,845	16,684	12,182	17,776	20,227	22,788	30,498
10	KEP. RIAU	40	-	-	-	4	-	-	6	1	12	-	8	10
11	DKI. JAKARTA	10	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	4
12	BANTEN	64,094	5,365	4,833	4,956	6,620	5,922	3,599	3,466	2,648	2,773	2,776	9,039	12,096
13	JAWA BARAT	531,043	51,895	31,594	39,527	50,967	52,150	33,617	34,300	29,611	30,574	24,356	65,198	87,254
14	D.I. YOGYAKARTA	36,989	2,862	1,825	2,352	2,624	2,167	1,248	2,236	2,816	5,206	3,485	4,349	5,818
15	JAWA TENGAH	679,347	54,144	55,480	65,394	58,497	50,899	34,785	43,575	38,055	48,778	55,398	74,560	99,778
16	JAWA TIMUR	1,074,758	76,784	60,396	83,098	84,935	73,990	63,003	75,933	87,102	83,999	97,998	122,963	164,557
17	B A L I	31,173	3,682	2,875	2,015	1,795	2,309	2,282	2,334	2,425	2,685	2,045	2,877	3,849
18	KALIMANTAN BARAT	17,508	1,191	1,547	1,427	1,275	1,539	948	1,338	1,190	1,166	1,431	1,905	2,549
19	KALIMANTAN TENGAH	17,154	1,559	1,603	2,334	1,823	1,899	1,203	653	692	755	1,014	1,549	2,071
20	KALIMANTAN SELATAN	21,273	2,762	2,154	2,168	2,843	1,960	950	621	669	800	1,743	1,968	2,635
21	KALIMANTAN TIMUR	17,934	1,733	1,794	1,485	1,548	1,590	1,083	1,446	1,179	869	1,087	1,762	2,359
22	KALIMANTAN UTARA	1,497	30	176	122	165	117	27	46	7	122	58	268	359
23	SULAWESI UTARA	22,526	2,064	2,032	2,262	1,724	1,740	1,283	1,099	1,249	1,611	1,473	2,561	3,427
24	GORONTALO	34,253	2,051	3,319	2,973	2,955	1,985	1,578	1,589	1,952	2,755	2,921	4,352	5,823
25	SULAWESI TENGAH	34,891	4,875	3,400	2,248	2,205	3,121	3,129	3,365	1,610	2,946	1,373	2,830	3,785
26	SULAWESI TENGGARA	21,467	2,541	1,765	2,018	1,305	1,468	1,595	1,595	1,778	1,929	1,166	1,843	2,466
27	SULAWESI SELATAN	305,534	42,579	21,839	20,656	25,776	34,733	27,544	18,439	14,724	17,365	18,823	26,967	36,089
28	SULAWESI BARAT	28,777	2,916	1,978	2,078	2,371	3,481	2,635	1,107	1,487	2,283	1,915	2,791	3,734
29	NUSA TENGGARA BARAT	161,289	25,815	14,399	9,410	11,879	11,136	11,294	9,534	7,753	8,153	12,518	16,850	22,547
30	NUSA TENGGARA TIMUR	27,702	5,137	4,163	2,131	1,361	863	1,055	1,829	1,716	1,601	1,931	2,530	3,384
31	MALUKU	3,362	486	425	210	177	248	33	455	200	185	174	329	438
32	PAPUA	7,522	658	1,115	632	629	656	410	480	423	506	462	664	888
33	MALUKU UTARA	1,301	-	112	96	173	37	14	15	50	44	152	260	348
34	PAPUA BARAT	1,127	27	162	55	32	55	46	152	80	16	124	162	216
	JUMLAH PROPINSI	3,825,000	350,680	283,519	307,589	321,090	312,410	232,313	253,799	239,376	267,876	294,078	411,534	550,724

LAMPIRAN II.2
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/Permentan/SR.310/11/2018
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	16,668	1,249	2,530	1,655	1,555	1,852	984	1,334	943	840	1,251	1,244	1,230
2	SUMATERA UTARA	32,155	897	4,127	4,627	3,375	2,979	1,519	2,778	2,128	2,177	2,369	2,603	2,577
3	SUMATERA BARAT	28,112	1,237	4,480	4,316	2,766	1,955	842	1,777	1,508	2,393	3,107	1,876	1,856
4	J A M B I	20,213	1,446	2,900	2,925	1,951	1,439	942	1,588	1,237	1,830	1,160	1,405	1,390
5	R I A U	16,651	564	1,994	2,755	1,793	1,611	539	1,245	944	956	1,734	1,265	1,252
6	BENGKULU	7,723	133	1,462	1,056	829	827	305	458	189	438	502	765	756
7	SUMATERA SELATAN	29,458	849	3,773	1,990	3,402	3,569	1,447	2,487	2,259	2,597	3,529	1,786	1,769
8	BANGKA BELITUNG	5,450	179	700	650	687	449	337	526	250	219	516	471	465
9	LAMPUNG	43,037	3,509	6,239	5,385	3,522	4,560	1,804	3,507	2,223	2,779	3,062	3,241	3,209
10	KEP. RIAU	10	-	-	-	1	1	-	3	-	1	2	2	3
11	DKI. JAKARTA	19	-	-	3	3	-	-	6	-	-	-	3	1
12	BANTEN	21,735	2,712	1,932	2,673	2,748	1,640	1,244	1,566	935	1,267	1,592	1,722	1,706
13	JAWA BARAT	154,833	19,947	14,095	14,675	15,659	14,279	8,479	11,416	8,225	11,343	8,898	13,979	13,839
14	D.I. YOGYAKARTA	3,647	387	347	423	339	273	175	272	259	283	302	296	294
15	JAWA TENGAH	130,038	10,896	13,186	16,774	13,804	9,690	5,735	7,853	7,094	10,653	12,163	11,151	11,038
16	JAWA TIMUR	155,499	16,144	13,860	17,857	14,223	12,794	7,670	12,930	10,285	13,018	13,735	11,550	11,432
17	B A L I	1,028	101	68	100	140	44	47	93	48	196	48	72	70
18	KALIMANTAN BARAT	6,368	215	635	1,040	900	556	183	804	479	575	358	313	309
19	KALIMANTAN TENGAH	4,639	346	899	714	475	833	202	178	124	114	229	264	261
20	KALIMANTAN SELATAN	4,070	485	795	640	309	492	199	200	174	237	230	155	155
21	KALIMANTAN TIMUR	5,237	176	926	618	489	565	297	521	409	319	381	270	265
22	KALIMANTAN UTARA	127	-	5	12	-	5	-	13	1	-	22	35	32
23	SULAWESI UTARA	4,118	166	566	411	418	485	389	157	326	342	335	263	260
24	GORONTALO	1,725	93	232	171	143	67	118	115	55	179	199	177	176
25	SULAWESI TENGAH	2,583	128	496	440	303	323	132	248	174	198	21	60	60
26	SULAWESI TENGGARA	7,609	1,080	845	1,036	994	544	541	487	456	487	515	314	309
27	SULAWESI SELATAN	48,803	6,085	5,056	5,232	5,654	4,884	2,854	3,449	2,442	2,062	4,653	3,231	3,199
28	SULAWESI BARAT	2,401	351	331	317	299	139	177	129	61	136	114	175	175
29	NUSA TENGGARA BARAT	18,688	1,586	1,825	2,276	2,751	1,245	1,201	1,188	437	645	856	2,351	2,329
30	NUSA TENGGARA TIMUR	3,107	631	590	214	121	181	62	383	200	172	177	189	188
31	MALUKU	323	23	44	77	22	20	14	13	11	14	46	20	18
32	PAPUA	2,654	378	484	406	182	205	277	301	78	57	173	57	54
33	MALUKU UTARA	141	15	15	20	13	9	2	5	8	27	7	10	8
34	PAPUA BARAT	131	2	45	6	11	3	5	9	11	25	4	4	3
	JUMLAH PROPINSI	779,000	72,010	85,482	91,494	79,881	68,518	38,722	58,039	43,973	56,579	62,290	61,319	60,688

LAMPIRAN II.3
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/Permentan/SR.310/11/2018
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	9,247	801	1,220	889	731	743	433	530	301	353	688	1,298	1,258
2	SUMATERA UTARA	29,107	881	2,920	3,747	3,193	2,913	1,165	2,795	1,944	2,315	2,692	2,308	2,234
3	SUMATERA BARAT	13,883	412	1,807	2,036	1,616	955	233	1,204	724	1,062	1,232	1,322	1,279
4	J A M B I	10,264	664	1,560	996	1,014	584	329	806	357	854	712	1,214	1,175
5	R I A U	12,621	657	1,587	1,901	1,352	1,261	340	921	731	790	1,036	1,038	1,006
6	BENGKULU	4,923	58	738	591	508	283	147	276	305	265	195	790	765
7	SUMATERA SELATAN	2,278	22	337	246	311	331	54	217	155	167	127	158	153
8	BANGKA BELITUNG	3,389	299	813	306	589	216	36	15	69	37	207	407	394
9	LAMPUNG	13,537	725	1,720	2,438	1,405	782	420	1,344	971	1,257	742	880	853
10	KEP. RIAU	10	-	-	-	1	1	-	3	-	1	-	3	2
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	1,315	47	109	203	128	132	84	122	40	70	74	155	150
13	JAWA BARAT	70,708	9,550	6,158	7,024	6,831	6,719	3,664	4,347	3,173	4,880	4,697	6,941	6,725
14	D.I. YOGYAKARTA	9,267	880	530	749	819	726	574	761	621	697	931	1,006	975
15	JAWA TENGAH	181,337	15,340	16,165	20,115	16,947	13,868	9,633	12,847	9,958	13,848	16,592	18,299	17,724
16	JAWA TIMUR	508,938	51,601	38,954	44,599	41,968	37,855	26,728	46,383	44,722	43,829	47,937	42,856	41,507
17	B A L I	3,239	505	184	134	230	174	158	223	326	618	150	273	263
18	KALIMANTAN BARAT	1,900	114	157	257	126	135	36	292	137	165	135	176	172
19	KALIMANTAN TENGAH	1,356	67	319	157	118	278	57	43	17	38	42	111	107
20	KALIMANTAN SELATAN	709	92	122	92	68	87	20	42	26	53	51	28	30
21	KALIMANTAN TIMUR	2,395	39	499	261	202	186	87	171	63	60	145	346	336
22	KALIMANTAN UTARA	32	-	2	5	-	3	-	1	-	2	1	8	8
23	SULAWESI UTARA	342	-	25	44	6	83	17	19	15	8	15	55	53
24	GORONTALO	830	-	52	58	134	76	52	44	1	8	131	139	135
25	SULAWESI TENGAH	7,741	545	1,119	774	713	851	418	973	532	634	229	484	469
26	SULAWESI TENGGARA	4,581	282	808	346	338	366	219	324	339	362	282	464	449
27	SULAWESI SELATAN	72,740	8,566	5,841	6,891	7,303	6,091	4,812	4,382	4,019	5,117	6,483	6,724	6,510
28	SULAWESI BARAT	9,162	1,046	939	939	964	772	635	470	205	361	909	977	945
29	NUSA TENGGARA BARAT	18,525	1,528	2,548	1,586	1,665	1,494	1,410	1,375	732	898	1,864	1,739	1,685
30	NUSA TENGGARA TIMUR	627	74	69	56	59	51	13	38	28	44	37	82	79
31	MALUKU	229	31	10	40	15	25	10	2	7	-	28	32	31
32	PAPUA	576	33	57	26	53	56	35	67	28	24	59	70	69
33	MALUKU UTARA	128	2	14	24	13	8	3	7	2	13	5	18	18
34	PAPUA BARAT	64	-	27	7	-	4	1	1	2	3	5	7	7
	JUMLAH PROPINSI	996,000	94,861	87,410	97,537	89,420	78,109	51,823	81,045	70,550	78,833	88,433	90,408	87,566

LAMPIRAN II.4
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/Permentan/SR.310/11/2018
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	35,249	2,387	2,901	2,842	2,702	3,147	1,783	2,222	2,117	2,923	3,996	4,144	4,087
2	SUMATERA UTARA	78,129	2,306	9,618	9,925	6,371	6,588	4,631	8,862	6,353	8,343	5,892	4,652	4,588
3	SUMATERA BARAT	58,359	3,470	7,060	5,661	5,178	5,144	3,301	5,037	2,951	3,286	4,829	6,266	6,178
4	J A M B I	55,759	-	-	-	7,435	4,832	-	30,482	-	5,576	3,717	1,859	1,859
5	R I A U	50,080	-	-	8,347	8,347	-	-	-	-	16,693	-	8,347	8,346
6	BENGKULU	25,327	2,433	1,807	1,877	2,364	2,716	1,590	1,752	852	1,058	1,068	3,932	3,878
7	SUMATERA SELATAN	75,586	7,395	5,049	5,737	7,581	7,523	4,432	5,013	4,170	4,400	3,878	10,276	10,132
8	BANGKA BELITUNG	20,308	1,493	1,441	1,659	1,830	1,518	938	1,181	1,281	1,828	2,176	2,499	2,464
9	LAMPUNG	152,567	8,287	12,099	16,119	13,483	10,590	7,022	10,044	8,785	11,999	12,903	20,764	20,473
10	KEP. RIAU	143	10	10	13	12	10	7	12	11	12	12	17	17
11	DKI. JAKARTA	15	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
12	BANTEN	30,527	1,646	3,153	2,876	1,785	2,982	2,749	2,833	1,806	2,190	2,502	3,024	2,982
13	JAWA BARAT	291,251	31,695	26,690	20,578	24,871	18,186	19,522	25,428	18,965	16,106	26,247	31,703	31,261
14	D.I. YOGYAKARTA	24,351	2,738	2,238	2,580	3,428	2,036	1,247	1,217	840	1,180	1,908	2,487	2,452
15	JAWA TENGAH	347,267	36,226	36,644	38,104	30,337	29,237	24,118	29,588	16,916	12,604	22,220	35,885	35,391
16	JAWA TIMUR	590,710	18,255	76,869	61,039	73,019	52,197	28,238	20,394	18,540	28,523	69,026	72,876	71,735
17	B A L I	19,204	746	1,717	2,192	1,540	2,147	1,314	1,264	1,263	1,479	1,227	2,173	2,141
18	KALIMANTAN BARAT	44,227	803	4,193	4,027	5,243	2,926	1,737	2,532	2,713	4,576	7,348	4,093	4,033
19	KALIMANTAN TENGAH	31,757	2,293	3,370	3,964	3,141	3,727	1,810	2,618	1,872	2,343	1,079	2,790	2,752
20	KALIMANTAN SELATAN	26,082	2,074	3,072	1,327	3,094	2,254	971	2,554	2,039	2,121	1,986	2,312	2,279
21	KALIMANTAN TIMUR	36,699	2,528	2,417	3,027	3,633	4,091	2,990	2,904	1,936	1,794	2,525	4,458	4,395
22	KALIMANTAN UTARA	4,642	359	474	412	375	465	289	347	181	251	334	582	573
23	SULAWESI UTARA	12,391	1,578	1,200	786	940	864	816	874	585	829	1,162	1,388	1,369
24	GORONTALO	28,878	4,784	4,615	2,483	1,224	1,353	1,100	2,110	1,917	1,337	1,578	3,211	3,165
25	SULAWESI TENGAH	27,353	1,552	951	3,249	2,221	2,687	2,231	2,609	3,094	4,074	669	2,018	1,998
26	SULAWESI TENGGARA	18,608	1,588	2,670	2,344	1,694	1,603	872	1,469	801	810	1,526	1,626	1,605
27	SULAWESI SELATAN	136,666	9,065	12,087	18,062	21,564	8,928	4,601	6,250	6,868	13,873	15,384	10,095	9,888
28	SULAWESI BARAT	22,655	184	3,245	2,070	710	1,029	2,486	2,915	2,314	1,347	882	2,755	2,719
29	NUSA TENGGARA BARAT	49,622	3,384	4,257	4,746	4,470	4,139	2,703	3,773	3,151	3,655	3,933	5,745	5,665
30	NUSA TENGGARA TIMUR	16,971	2,812	2,712	1,459	719	795	646	1,240	1,127	786	927	1,887	1,862
31	MALUKU	2,645	150	92	314	215	260	216	252	299	394	65	195	193
32	PAPUA	8,375	715	1,202	1,055	763	721	393	661	361	364	687	732	722
33	MALUKU UTARA	1,865	124	165	246	294	122	63	85	94	189	210	138	135
34	PAPUA BARAT	1,732	14	248	158	54	79	190	223	177	103	67	211	207
JUMLAH PROPINSI		2,326,000	153,096	234,267	229,279	240,638	184,897	125,007	178,746	114,380	157,047	201,964	255,141	251,544

LAMPIRAN II.5
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/Permentan/SR.310/11/2018
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	6,605	399	736	784	718	913	246	730	261	549	528	387	354
2	SUMATERA UTARA	15,625	1,747	1,115	1,972	1,688	639	642	1,406	1,260	1,024	1,240	1,507	1,386
3	SUMATERA BARAT	10,809	773	941	1,432	848	539	492	1,005	995	910	911	1,023	940
4	J A M B I	6,974	274	448	583	1,206	463	314	349	100	976	100	1,126	1,036
5	R I A U	8,741	1,143	851	795	1,099	561	385	721	425	639	749	716	657
6	BENGKULU	4,334	246	382	539	603	269	349	800	167	205	172	315	286
7	SUMATERA SELATAN	4,871	221	930	539	295	443	74	494	509	413	384	295	272
8	BANGKA BELITUNG	9,419	123	1,358	443	896	703	448	1,335	208	406	962	1,325	1,211
9	LAMPUNG	18,950	2,527	316	1,263	948	2,527	-	-	632	-	5,369	2,843	2,526
10	KEP. RIAU	70	-	14	-	4	2	-	6	7	25	-	6	6
11	DKI. JAKARTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	BANTEN	8,188	776	881	444	747	1,002	338	1,028	312	497	704	761	698
13	JAWA BARAT	70,405	5,375	4,343	5,598	4,940	8,870	5,757	5,523	4,209	3,906	5,443	8,574	7,867
14	D.I. YOGYAKARTA	3,899	159	243	252	363	469	409	683	202	302	114	365	336
15	JAWA TENGAH	198,121	13,522	18,259	20,344	18,234	15,199	9,983	15,909	11,773	16,182	19,121	20,649	18,947
16	JAWA TIMUR	507,404	38,936	41,497	51,675	43,500	35,937	22,135	44,613	38,875	41,582	51,460	50,684	46,510
17	B A L I	5,298	413	274	419	305	384	439	406	318	450	707	618	568
18	KALIMANTAN BARAT	5,838	163	331	719	608	466	254	652	478	635	424	578	532
19	KALIMANTAN TENGAH	2,862	11	205	720	400	295	87	84	140	56	111	393	361
20	KALIMANTAN SELATAN	3,374	249	361	450	307	470	171	229	220	287	223	213	195
21	KALIMANTAN TIMUR	2,837	54	429	235	290	180	177	356	139	227	402	183	168
22	KALIMANTAN UTARA	163	-	13	30	9	15	3	19	15	7	22	15	16
23	SULAWESI UTARA	1,243	13	229	106	83	177	83	31	151	36	93	126	116
24	GORONTALO	1,684	52	191	126	205	18	84	83	6	372	86	241	218
25	SULAWESI TENGAH	2,650	160	295	314	288	366	99	293	105	220	212	155	143
26	SULAWESI TENGGARA	5,731	641	409	723	619	234	236	516	462	376	455	553	507
27	SULAWESI SELATAN	23,493	1,681	2,046	3,112	1,843	1,171	1,070	2,184	2,163	1,979	1,980	2,224	2,040
28	SULAWESI BARAT	1,725	68	111	144	298	115	78	86	25	242	25	278	258
29	NUSA TENGGARA BARAT	11,010	1,440	1,072	1,001	1,384	706	484	909	536	804	944	901	830
30	NUSA TENGGARA TIMUR	2,415	137	213	300	336	150	194	446	93	114	96	176	159
31	MALUKU	815	37	156	90	49	74	12	83	85	69	64	49	45
32	PAPUA	2,247	29	324	106	214	168	107	318	50	97	230	316	290
33	MALUKU UTARA	74	10	1	5	4	10	-	-	2	-	21	11	11
34	PAPUA BARAT	125	1	26	-	6	3	-	10	13	45	1	11	8
	JUMLAH PROPINSI	948,000	71,380	79,000	95,263	83,337	73,538	45,150	81,307	64,936	73,632	93,353	97,617	89,498